

ABSTRAK

Tindak pidana Penganiayaan adalah tindak pidana terhadap tubuh yang sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, bahkan kematian. Dalam penelitian ini ada dua hal yang menjadi fokus penelitian, Pertama, bagaimana proses hukum terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan SZ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. Kedua, bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh SZ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terkait dengan kasus, baik dari buku, jurnal maupun dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sedangkan teknik analisis data ini akan diklasifikasikan serta dianalisis secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Palembang ini terjadi karena adanya kesalahpahaman antara pelaku dan korban, sehingga terjadilah penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka-luka. Atas dasar hal tersebut Anggota DPRD Kota Palembang dikenakan hukuman pidana penjara selama dua tahun delapan bulan, namun atas pertimbangan hakim maka hukumannya menjadi tujuh bulan . Adapun menurut pandangan Hukum Pidana Islam Anggota DPRD yang melakukan tindak pidana penganiayaan termasuk ke dalam golongan hukuman *qishash* dan *diyat*, karena telah melakukan penganiayaan, namun hukuman *qishash* dihilangkan karena pelaku dan korban telah melakukan perdamaian sehingga hanya dikenakan hukuman *diyat* atau ganti rugi sebagai bentuk permohonan maaf pelaku kepada pihak korban.

Kata Kunci: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana Penganiayaan.

ABSTRACT

The crime of maltreatment is a crime against the body that intentionally causes pain, injury, or even death. In this research, there are two things that are the focus of the research. First, what is the legal process for cases of abuse committed by SZ, a member of the Palembang City Regional People's Representative Council. Second, what is the view of Islamic Criminal Law regarding the abuse carried out by SZ, a member of the Palembang City Regional People's Representative Council. This research uses qualitative methods, and this type of research is library research. The data collection technique in this research is by collecting data from various sources related to the case, both from books, journals and documents related to the problem being studied, while the data analysis technique will be classified and analyzed descriptively.

The results of this research can be concluded that the crime of abuse committed by members of the Palembang City DPRD occurred because of a misunderstanding between the perpetrator and the victim, resulting in abuse that caused the victim to suffer injuries. Based on this, members of the Palembang City DPRD were sentenced to prison for two years and eight months, however, based on the judge's consideration, the sentence was reduced to seven months. Meanwhile, according to Islamic Criminal Law, DPRD members who commit criminal acts of abuse are included in the category of qishash and diyat punishment, because they have committed abuse, but the qishash penalty is removed because the perpetrator and the victim have made peace so they are only subject to diyat or compensation as a form of apology perpetrator to the victim.

Keywords: Crime of Persecution, Islamic Criminal Law, Member of the House of Representatives.